

FORMULASI GEOPOLITIK DI ERA REFORMASI

Ahmad Calam dan Sobirin

ABSTRAK

Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional (*national outlook*) yang merupakan gambaran wilayah dan visi bangsa. Indonesia melihat wawasan nasional diharapkan dapat menatap tubuh bangsa menuju ke masa depan. Adapun wawasan nasional bangsa Indonesia di kenal dengan Wawasan Nusantara. Istilah wawasan nusantara terdiri dari dua buah kata yakni wawasan dan nusantara. Wawasan berasal dari kata 'wawas' yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata 'mawas' yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Sehingga wawasan dapat berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata 'nusa' yang berarti pulau-pulau, dan 'antara' yang berarti diapit di antara dua hal (dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yakni samudera Pasifik dan samudera Hindia).

Kata Kunci: geopolitik, wawasan nusantara

A. PENDAHULUAN

Wawasan Nasional adalah cara pandang/melihat suatu bangsa yang telah bernegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistansinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional dan global.

Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumberkan Pancasila dan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan satu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama :

- a. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup
- b. Jiwa, tekad, dan semangat manusianya atau rakyatnya Lingkungan sekitarnya

Kehidupan manusia di dunia mempunyai kedudukan sebagai hamba Tuhan Yang Maha

Esa dan sebagai wakil Tuhan di bumi yang menerima amanat-NYA untuk mengelola kekayaan alam. Adapun sebagai wakil Tuhan di bumi, manusia dalam hidupnya berkewajiban memelihara dan memanfaatkan segenap karunia kekayaan alam dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidupnya. Manusia dalam menjalankan tugas dan kegiatan hidupnya bergerak dalam dua bidang yaitu universal filosofis dan sosial politis. Bidang universal filosofis bersifat *transenden* dan *idealistik* misalnya dalam bentuk aspirasi bangsa, pedoman hidup dan pandangan hidup bangsa. Aspirasi bangsa ini menjadi dasar wawasan nasional bangsa Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah Nusantara.

Sebagai negara kepulauan dengan masyarakatnya yang berbhineka, negara Indonesia memiliki unsur-unsur kekuatan sekaligus kelemahan. Kekuatannya terletak pada posisi dan keadaan geografi yang strategis dan kaya akan sumber daya alam (SDA). Sementara kelemahannya terletak pada wujud kepulauan dan keanekaragaman masyarakat yang harus disatukan dalam satu bangsa, satu negara dan satu tanah air.

Dalam kehidupannya, bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh interaksi dan interelasi dengan lingkungan sekitarnya (regional atau internasional). Dalam hal ini bangsa Indonesia memerlukan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman agar tidak terombang – ambing dalam memperjuangkan kepentingan nasional untuk mencapai cita-cita serta tujuan nasionalnya. Salah satu pedoman bangsa Indonesia wawasan nasional yang berpijak pada wujud wilayah nusantara sehingga disebut WAWASAN NUSANTARA. Karena hanya dengan upaya inilah bangsa dan negara Indonesia tetap eksis dan dapat melanjutkan perjuangan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sentosa.

Setiap bangsa mempunyai wawasan nasional (*national outlook*) yang merupakan gambaran dan visi bangsa yang bersangkutan menuju ke masa depan. Adapun wawasan nasional bangsa Indonesia di kenal dengan Wawasan Nusantara. Istilah wawasan nusantara terdiri dari dua buah kata yakni wawasan dan nusantara. Wawasan berasal dari kata ‘wawas’ yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan inderawi. Akar kata ini membentuk kata ‘mawas’ yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Sehingga wawasan dapat berarti cara pandang, cara meninjau, atau cara melihat. Sedangkan Nusantara berasal dari kata ‘nusa’ yang berarti pulau-pulau, dan ‘antara’ yang berarti diapit di antara dua hal (dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta dua samudera yakni samudera Pasifik dan samudera Hindia). Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang falsafah pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan, terbetuklah satu wawasan nasional indonesia yang disebut wawasan nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai ini berkembang sebagai berikut:

1. Pengertian wawasan nusantara berdasarkan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN adalah sebagai berikut:
wawasan nusantara yang merupakan wawasan nasional yang bersumber pada

Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

2. Pengertian wawasan nusantara menurut Wan usman; “wawasan nusantara adalah cara pandang bangsa indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam”. Hal tersebut disampaikan saat lokakarya wawsan nusantara dan ketahanan nasional di Lemhanas pada Januari 2000. Ia juga menjelaskan bahwa wawasan nusantara merupakan geopolitik indonesia.
3. Pengertian wawasan nusantara, menurut kelompok kerja wawasan nusantara, yang diusulkan menjadi ketetapan majelis permusyawaratan rakyat dan dibuat di Lemhanas tahun 1999 adalah sebagai berikut:
“cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang berseragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASAN NUSANTARA

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara diantaranya:

1. Wilayah (geografi).
 - a. Asas Kepulauan (archipelagic principle)
Kata ‘archipelago’ dan ‘archipelagic’ berasal dari kata Italia yakni ‘archipelagos’. Akar katanya adalah ‘archi’ yang berarti terpenting, terutama dan ‘pelagos’ berarti laut atau wilayah lautan. Jadi archipelago adalah lautan terpenting.
Lahirnya asas archipelago

mengandung pengertian bahwa pulau – pulau tersebut selalu dalam kesatuan utuh, sementara tempat unsur perairan atau lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung dan bukan sebagai unsur pemisah.

b. Kepulauan Indonesia

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia dan diantara samudra Pasifik dan samudra Indonesia, yang terdiri dari 17.508 pulau besar maupun kecil.

Kepulauan Indonesia terletak pada batas astronomi sbb:

Utara: $\pm 6^{\circ}08'LU$

Selatan: $\pm 11^{\circ}15'LS$

Barat: $\pm 94^{\circ}45'BT$

Timur: $\pm 141^{\circ}05'BT$

Jarak utara-selatan sekitar 1.888

Kemerdekaan, sedangkan jarak barat-timur sekitar 5.110 Kemerdekaan. Luas wilayah Indonesia seluruhnya adalah 5.193.250 km², yang terdiri dari daratan seluas 2.027.087 km² dan perairan seluas 3.166.163 km².

c. Konsep tentang Wilayah Lautan.

Dalam perkembangan hukum laut internasional dikenal beberapa konsep mengenai kepemilikan dan penggunaan wilayah laut sebagai berikut :

- Res Nullius : menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memilikinya.

- Res Cimmunis : menyatakan bahwa laut itu adalah milik masyarakat dunia karena tidak dapat dimiliki oleh masing – masing negara.

Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau – pulau yang lain. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan diantaranya.

Laut Teritorial adalah satu wilayah laut yang lebarnya tidak melebihi 12 mil laut diukur dari garis pangkal, sedangkan garis pangkal adalah garis air surut terendah sepanjang pantai. Perairan Pedalaman

adalah wilayah sebelah dalam daratan atau sebelah dalam dari garis pangkal.

Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE), dimana tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE, negara yang bersangkutan memiliki hak kedaulatan untuk keperluan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alami hayati dari perairan

Landasan Kontinen suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya.. Jaraknya 200 mil dari garis pangkal tau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350 mil, tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2500 m.

2. Geopolitik dan Geostrategi.

a. Geopolitik.

- Pengertian Geopolitik.

Geografi mempelajari fenomena geografi dari aspek politik, sedangkan geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi.

Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nusantara.

- Pandangan ajaran Frederich Ratzel.

Pokok-Pokok ajaran F. Ratzel adalah sebagai berikut

1) Dalam hal-hal tertentu pertumbuhan negara dapat dianalogikan dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang lingkup, melalui proses lahir, tumbuh, berkembang, mempertahankan hidup, menyusut dan mati.

2) Negara identik dengan suatu ruang yang ditempati oleh kelompok politik dalam arti kekuatan. Makin luas potensi ruang tersebut, makin besar kemungkinan kelompok politik itu tumbuh (teori ruang, konsep ruang)

3) Suatu bangsa dalam mempertahankan

kelangsungan hidupnya tidak terlepas dari hukum alam. Hanya bangsa yang unggul saja yang dapat bertahan hidup.

4) Semakin tinggi budaya suatu bangsa, semakin besar kebutuhan akan sumber akan sumber daya alam. Apabila wilayah/ruang hidup tidak mendukung, bangsa tersebut akan mencari pemenuhan kebutuhan akan kekayaan alam diluar wilayahnya (*ekspansi*).

- Pandangan Karl Haushofer.

Rumusan ajaran Karl Haushofer lainnya adalah sebagai berikut: Geopolitik adalah doktrin negara yang manitikberatkan soal-soal strategi perbatasan. Ruang hidup bangsa dan tekanan-tekanan kekuasaan dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam di dunia. Geopolitik adalah landasan bagi tindakan politik dalam perjuangan mendapatkan ruang hidup.

- Pandangan Ajaran Sir Walter Raleigh dan Alfred Thyer Mahan.

Kedua ahli ini mempunyai gagasan "wawasan bahari", yaitu kekuatan di laut. ajarannya mengatakan bahwa barang siapa menguasai laut akan menguasai "perdagangan". Menguasai perdagangan berarti menguasai "kekayaan dunia" sehingga pada akhirnya menguasai dunia.

- Pandangan Ajaran W. Mitchel, A.Saversky, Giulio Douhet dan John Frederik Charles Fuller. Keempat ahli geopolitik ini berpendapat bahwa kekuatan di udara justru yang paling menentukan..Mereka melahirkan teori "wawasan dirgantara" yaitu konsep kekuatan di udara. Kekuatan di udara hendaknya mempunyai daya yang dapat diandalkan untuk menangkis ancaman dan melumpuhkan kekuatan lawan dengan menghancurkannya dikandangannya sendiri agar lawan tidak mampu lagi menyerang.

- Geopolitik Bangsa Indonesia.

Paham Lenin (XIX)

Lenin telah memodifikasi paham Clausewitz. Menurutnya, perang adalah kelanjutan politik dengan cara kekerasan Bagi Leninisme/komunisme, perang atau pertumpahan darah atau revolusi di seluruh dunia adalah sah dalam kerangka mengkomunikasikan seluruh bangsa di dunia Karena itu, selama perang dingin, baik Uni Soviet maupun RRC berlomba-lomba untuk mengeksport paham komunis ke seluruh dunia. G.30.S/PKI adalah salah satu komoditi ekspor RRC pada tahun 1965 Sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa paham komunisme ternyata berakhir secara tragis seperti runtuhnya Uni Soviet. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang didasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, karena penjajahan tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bangsa yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham perang dan damai : "Bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan". Wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran mengenai kekuasaan dan adu domba, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme. Ajaran wawasan nasional bangsa Indonesia menyatakan bahwa : Ideologi digunakan sebagai landasan idiil dalam menentukan politik nasional, dihadapkan pada kondisi dan konstelasi geografis Indonesia dengan segala aspek kehidupannya nasionalnya. Tujuannya adalah agar bangsa Indonesia dapat menjamin kepentingan bangsa dan negaranya ditengah-tengah perkembangan dunia.

Dalam menentukan, membina, dan mengembangkan wawasan nasionalnya, bangsa Indonesia menggali dan mengembangkan dari kondisi nyata yang terdapat di lingkungan Indonesia sendiri. Wawasan nasional Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan bangsa indonesia yang berlandaskan falsafah Pancasila dan pandangan geopolitik

Indonesia yang berlandaskan pemikiran kewilayahan dan kehidupan bangsa Indonesia. Karena itu, pembahasan latar belakang filosofis sebagai pemikiran pembinaan dan pengembangan wawasan nasional Indonesia ditinjau dari :

- a. Latar Belakang Pemikiran berdasarkan Falsafah Pancasila
- b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayah Nusantara
- c. Latar belakang pemikiran aspek Sosial Budaya bangsa Indonesia
- d. Latar belakang aspek Kesejarahan bangsa Indonesia

b. Geostrategi.

Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik. Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai aspek, disamping aspek aspek geografi juga dari aspek-aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.

Dengan demikian geostrategis adalah perumusan strategi nasional dengan memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografi sebagai faktor utama

3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya

a. Sejak 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957 Pada masa tersebut wilayah Negara Republik Indonesia bertumpu pada wilayah daratan pulau-pulau yang saling terpisah oleh perairan atau selat di antara pulau-pulau itu. Wilayah laut teritorial masih sangat sedikit karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil disekelilingnya.

b. Dari Deklarasi Juanda (13-12-1957) sampai dengan 17-2-1969

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan Deklarasi Juanda dengan tujuan sebagai berikut:

- 1) Perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat.
- 2) Penentuan batas-batas wilayah Negara Indonesia disesuaikan dengan asas Negara kepulauan (*archipelagic state principles*).
- 3) Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Dari 17-2-1969 (Deklarasi Landas kontinen) Sampai Sekarang

Deklarasi tentang landas kontinen Negara RI merupakan konsep politik yang berdasarkan wilayah. Disamping di pandang pula sebagai upaya untuk mewujudkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

d. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)

Pengumuman Pemerintah tentang Zona Ekonomi Eksklusif terjadi pada 21 Maret 1980. Batas ZEE adalah selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wilayah Indonesia. Alasan-alasan yang mendorong sebagai – berikut:

- 1) Persediaan ikan yang semakin terbatas.
- 2) Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
- 3) ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional

Dengan demikian, wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah bernegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung (melalui interaksi dan interelasi) dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional (termasuk lokal dan propinsional), regional, serta global

C. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI WAWASAN NASIONAL

1. Wilayah (geografi)
 - a. Asas kepulauan
 - b. Kepulauan Indonesia
 - c. Konsep tentang wilayah lautan
 - d. Karakteristik wilayah nusantara
2. Geopolitik dan Geostrategis

Geopolitik mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geostrategi adalah politik dalam pelaksanaan yaitu upaya mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai keinginan-keinginan politik.

D. KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUJUAN

1. Kedudukan

a. Wawasan nusantara merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dalam upaya mewujudkan tujuan nasional.

b. Wawasan nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut :

1. Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa dan dasar Negara, berkedudukan sebagai landasan idil.
2. UUD 1945 sebagai landasan konstitusi Negara, berkedudukan sebagai landasan konstitusional.
3. Wawasan nusantara sebagai visi nasional, berkedudukan sebagai landasan visional
4. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijaksanaan nasional, berkedudukan sebagai landasan operasional.

2. Fungsi

Sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan Negara ditingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

3. Tujuan

Mewujudkan nasionalisme di kehidupan rakyat Indonesia. Dengan adanya wawasan nusantara kita dapat mempererat rasa persatuan diantara penduduk Indonesia yang saling berbhineka tunggal ika dan kita dapat memiliki sikap dan prilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban begi nusa dan bangsa.. Ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional dapat berjalan dengan sukses.

4. Wawasan Nasional

Sebelum membahas Wawasan Nusantara, kita sebaiknya terlebih dahulu mengerti dan memahami wawasan nasional suatu secara universal. Suatu bangsa meyakini bahwa kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang datang dari Tuhan, pencipta alam semesta. Manusia memiliki kelebihan dari makhluk yang lain melalui akal pikiran dan budi nuraninya. Namun, kemampuannya dalam menggunakan akal pikiran dan budi nurani tersebut terbatas, sehingga manusia yang satu dan yang lain tidak memiliki tingkat kemampuan yang sama. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, keanekaragaman tersebut memerlukan perekat agar bangsa yang bersangkutan dapat bersatu memelihara keutuhan negaranya. Suatu bangsa yang telah bernegara, dalam menyelenggarakan kehidupannya tidak terlepas dari pengaruh lingkungannya. Pengaruh itu timbul dari hubungan timbal balik antara filosofi bangsa, ideologi, aspirasi serta cita-cita dan kondisi sosial masyarakat, budaya, tradisi, keadaan alam, wilayah serta pengalaman sejarahnya.

Pemerintah dan rakyat memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nasional untuk menyelenggarakan kehidupannya. Wawasan ini dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah serta jati diri bangsa. Kata “wawasan” itu sendiri berasal dari wawas (bahasa Jawa) yang artinya melihat atau memandang. Dengan penambahan akhiran “an” kata ini secara harfiah memiliki arti yaitu cara meliha atau cara tinjau atau cara pandang. Kehidupan suatu bangsa dan negara senantiasa dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis. Karena itu, wawasan itu harus mampu memberi inspirasi pada suatu bangsa dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan yang ditimbulkan oleh lingkungan strategis dan dalammengejarkejayannya.

Dalam mewujudkan aspirasi dan perjuangan, satu bangsa perlu memperhatikan tiga faktor utama:

1. Bumi atau ruang dimana bangsa itu hidup

2. Jiwa, tekad, dan semangat manusiawi atau rakyatnya
3. Lingkungan sekitarnya

Teori Kekuasaan Sebagai Lahirnya Wawasan Nasional Suatu Bangsa. Wawasan nasional suatu bangsa dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dianutnya. Beberapa teori paham kekuasaan dan teori geopolitik. Perumusan wawasan nasional lahir berdasarkan pertimbangan dan pemikiran mengenai sejauh mana konsep operasionalnya dapat diwujudkan dan dipertanggungjawabkan. Teori-teori yang dapat mendukung rumusan tersebut antara lain:

a. Paham Kaisar Napoleon Bonaparte (abad XVIII)

Kaisar Napoleon merupakan tokoh revolusioner di bidang cara pandang, selain penganut baik dari Machiavelli. Napoleon berpendapat bahwa perang di masa depan akan merupakan perang total yang mengerahkan segala upaya dan kekuatan nasional. Kekuatan ini juga perlu didukung oleh kondisi sosial budaya berupa ilmu pengetahuan teknologi demi terbentuknya kekuatan hankam untuk menduduki dan menjajah negara-negara disekitar Prancis. Ketiga Postulat Machiavelli telah diimplementasikan dengan sempurna oleh Napoleon, namun menjadi bumerang bagi dirinya sendiri sehingga akhir kariernya dibuang ke Pulau Elba.

b. Paham Jendral Clausewitz (XVIII)

Pada era Napoleon, Jenderal Clausewitz sempat terusir oleh tentara Napoleon dari negaranya sampai ke Rusia. Clausewitz akhirnya bergabung dan menjadi penasihat militer Staf Umum Tentara Kekaisaran Rusia. Sebagaimana kita ketahui, invasi tentara Napoleon pada akhirnya terhenti di Moskow dan diusir kembali ke Prancis. Clausewitz, setelah Rusia bebas kembali, diangkat menjadi kepala staf komando Rusia. Di sana dia menulis sebuah buku mengenai perang berjudul *Vom Kriege* (Tentara Perang). Menurut Clausewitz, perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain.

Baginya, peperangan adalah sah-sah saja untuk mencapai tujuan nasional suatu bangsa. Pemikiran inilah yang membenarkan Rusia berekspansi sehingga menimbulkan Perang Dunia I dengan kekalahan di pihak Rusia atau Kekaisaran Jerman.

E. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut:

1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila.

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang.

Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia.

2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional

a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik

Bangsa Indonesia bersama bangsa-bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui politik luar negeri yang bebas aktif. Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis.

b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Di samping itu, implementasi wawasan nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelola

sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antar daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri

Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya. d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan keamanan Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela negara ini menjadi modal utama yang akan mengerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menghadapi setiap bentuk ancaman

3. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan berkembang seterusnya.

F. TANTANGAN DARI IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

Dewasa ini kita menyaksikan bahwa kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sedang mengalami perubahan. Dan kita juga menyadari bahwa faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang di bawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya

Apabila kita menengok sejarah kehidupan manusia dan alam semesta, perubahan dalam kehidupan itu adalah suatu hal yang wajar, alamiah. Dalam dunia ini, yang abadi dan kekal itu adalah perubahan. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang syarat dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan di bentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, apakah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan terhanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan nilai global yang menantang Wawasan Persatuan bangsa. Tantangan itu antara lain adalah pemberdayaan rakyat yang optimal, dunia yang tanpa batas, era baru kapitalisme, dan kesadaran warga negara

1. Konsepsi Ketahanan Nasional

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa Indonesia yang meliputi segenap kehidupan nasional yang berintegritas, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar, untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

2. Fungsi Ketahanan Nasional Dalam Bangsa Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Ketahanan Nasional dalam fungsinya sebagai doktrin dasar nasional perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak dan pola kerja dalam

menyatukan langkah bangsa yang bersifat inter-regional, inter-sektoral maupun multi disiplin. Konsep doktriner pada hakikatnya merupakan arah dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional disegala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program.

3. Konsep Ketahanan Nasional Dalam Islam

Akhir-akhir ini, konflik antar umat beragama mulai berkembang ke arah tingkat yang mengkhawatirkan dan mengancam kesatuan dan peratuan bangsa serta NKRI. Lembaga Pertahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional dengan risau menyebutkan memudarnya kesadaran pancasila pada kelompok elit di Indonesia. Indikasinya adalah lahirnya kebijakan-kebijakan pemerintah, MUI dan lembaga-lembaga public lainnya. Ketika pancasila dicoba untuk dipertentangkan dengan islam, ketika islam seolah-olah dipersepsikan anti pancasila atau pancasila dipersepsi sebagai tidak Islami. Pancasila yang sesuai dengan cita-cita harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara ditengah realitas keragaman agama, suku, ras, dan golongan antar komponen dan unsur penyusun Negara bangsa Indonesia ini. Penafsiran Demokrasi dan HAM dalam pandangan Islamisme membawa misi Rahmatan lil 'alamin secara tepat dan benar sesuai kaidah berfikir filosofis dan ilmiah.

4. Aspek Ketahanan Nasional

a. Aspek Ekonomi

Ketahanan Nasional dalam bidang ekonomi merupakan suatu kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan, kekuatan nasional dalam menghadapi tantangan dan dinamika perekonomian Indonesia dari dalam ataupun luar negeri dan secara langsung maupun tidak langsung menjamin kelangsungan dan peningkatan perekonomian bangsa Indonesia yang telah diatur berdasarkan UUD 1945. Wujud Ketahanan ekonomi mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis menciptakan kemandirian ekonomi nasional yang berdaya tinggi, dan mewujudkan

kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Ketahanan ekonomi hakikatnya merupakan kondisi kehidupan perekonomian bangsa berlandaskan UUD 1945 dan dasar filosofi Pancasila, yang menekankan kesejahteraan bersama dan mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta menciptakan kemandirian perekonomian nasional dengan daya saing yang tinggi.

b. Aspek Sosial Budaya

Ketahanan Nasional dalam bidang Sosial Budaya adalah suatu kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan, ketangguhan, dari kemampuan suatu bangsa untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, permasalahan, gangguan, ancaman serta hambatan baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kelangsungan kehidupan social budaya bangsa dan Negara Republic Indonesia. Ketahanan Nasional bukannya untuk kekuasaan, ideology atau sekelompok penguasa atau bahkan bukan untuk reformasi melainkan untuk kesejahteraan dan kebersamaan seluruh elemen bangsa untuk hidup aman, tentram, damai yang berketuhanan Yang Maha Esa dan berprinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

c. Aspek Politik

Ketahanan Nasional bidang politik adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan potensi nasional menjadi kekuatan nasional, sehingga dapat menangkal dan mengatasi segala kesulitan dan gangguan yang dihadapi oleh Negara. Agar terwujudnya ketahanan politik dalam era reformasi, seluruh lapisan kekuatan social politik harus memiliki kesadaran akan pentingnya bernegara demi terwujudnya kesejahteraan seluruh rakyat.

d. Aspek Ideologi

Ketahanan Nasional bidang Ideologi ini dapat diartikan mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala

tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang yang membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi bangsa Indonesia.

Langkah Pembinaan memperkuat Ketahanan Ideologi :

- ❖ Pengamalan Pancasila secara obyektif dan subyektif
- ❖ Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia
- ❖ Pendidikan moral Pancasila
- ❖ Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila.

e. Aspek Pertahanan dan Keamanan

Ketahanan Pertahanan dan Keamanan diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan Pertahanan dan Keamanan bangsa Indonesia mengandung keuletan, ketangguhan dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi dan mengatasi tantangan yang membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warga Negara Indonesia perlu memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa serta pencapaian tujuan.

G. POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

Strategi yang dilakukan dalam melaksanakan pembangunan dibidang social dan budaya adalah desentralisasi, peningkatan peran masyarakat termasuk dunia usaha, pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan perempuan dan keluarga, penguatan kelembagaan termasuk peningkatan koordinati antar sector dan antar lembaga.

1. Arah Kebijakan

Sesuai dengan GBHN 1999/2004 arah kebijakan pembangunan social dan budaya adalah sebagai berikut :

A. Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial

a. Meningkatkan mutu SDM dan lingkungan yang saling mendukung dengan pendekatan paradigma sehat, yang memberikan prioritas pada upaya peningkatan kesehatan pencegahan, penyembuhan, pemulihan dan rehabilitasi sejak pemuatan dalam kandungan sampai lanjut usia.

b. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan

c. Mengembangkan system jaminan social tenaga kerja bagi seluruh tenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan keselamatan kerja yang memadai, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, perusahaan dan pekerja.

d. Membangun ketahanan social

e. Membangun apresiasi terhadap penduduk lanjut usia dan veteran

f. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan social melalui penyediaan lapangan kerja

g. Meningkatkan kualitas penduduk

h. Memberantas secara sistematis perdagangan dan penyalahgunaan Narkotik dan obat-obatan terlarang

i. Memberikan aksesibilitas fisik dan non fisik guna menciptakan perspektif penyandang cacat dalam segala pengambilan keputusan

A.1. Program Pengembangan Potensi Kesejahteraan Sosial

Program ini bertujuan mengembangkan kesadaran, kemampuan, tanggung jawab, dan peran aktif masyarakat dalam menangani permasalahan social dilingkungannya, serta memperbaiki kualitas hidup, kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan social.

Sasaran kinerja program ini adalah :

1. Terpenuhinya hak-hak anak untuk tumbuh kembang
2. Terlindunginya anak, lanjut usia dan perempuan dari tindak kekerasan
3. Tersedianya pelayanan social dan kemudahan untuk mengakses fasilitas umum

bagi penduduk lanjut usia, veteran dan penyandang cacat.

4. Meningkatkan kemampuan penyandang cacat agar dapat melakukan fungsi sosialnya secara layak

5. Terlindunginya hak-hak penyandang cacat ganda untuk hidup secara wajar

A.2. Program Peningkatan Kualitas Manajemen dan Profesionalisme Pelayanan Sosial

Program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu dan profesionalisme pelayanan social melalui pengembangan alternatif intervensi dibidang kesejahteraan social.

Sasaran Kinerja Program ini adalah :

1. Terumuskannya alternative intervensi pelayanan social

2. Meningkatnya kemampuan dan kompetensi pekerja social dan tenaga kesejahteraan social masyarakat

3. Meningkatnya pendayagunaan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih dalam menyelenggarakan pelayanan social

4. Tersedianya jasa dan informasi kesejahteraan sosial

5. Terumuskannya standarisasi legislasi pelayanan social

A.3 Program Pengembangan Sistem Informasi Masalah-masalah Sosial

Program ini bertujuan mengidentifikasi jenis data dan informasi yang diperlukan untuk bahan penentuan kebijakan masalah-masalah social dan untuk menyediakan data dan informasi yang benar dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan dunia usaha.

A.4 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan

Sasaran yang akan dicapai oleh program ini adalah :

1. Terciptanya kebijakan kesehatan yang menjamin dan tercapainya system kesehatan yang efisien, efektif, berkualitas dan berkesinambungan.

2. Terciptanya kebijakan kesehatan yang mendukung reformasi bidang kesehatan

3. Tersedianya SDM dibidang kesehatan yang mampu melakukan berbagai kajian kebijakan kesehatan

4. Berjalannya system perencanaan kesehatan melalui pendekatan wilayah dan sektoral dalam mendukung desentralisasi

5. Terciptanya organisasi dan tata laksana diberbagai tingkat administrasi.

H. GEOSTRATEGI (KETAHANAN NASIONAL)

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan kehidupannya, ek-sistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan nasionalnya perlu memiliki pemahaman tentang geopolitik dan dalam implementasinya diperlukan suatu strategi yang bersifat nasional, dan hal ini yang disebut sebagai "geostrategi". *Mapping global strategy* ke depan sangat diperlukan bagi setiap bangsa, dan bagi bangsa Indonesia Wawasan Nusantara merupakan konsep nasional dan ilmu geopolitik mengenai persatuan dan kesatuan dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai perekat bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

Geostrategi diartikan sebagai metode atau atauran-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bemiartabat. Sir Balford Mackinder (1861-1947) Guru Besar Geostrategi Universitas London, teori yang dikembangkannya tentang "*geostrategi continental*", merupakan teori yang saat ini digunakan oleh negara-negara maju maupun negara-negara berkembang (Suradinata, 2005: 10).

Bagi bangsa Indonesia geopolitik diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Karena tujuan itu maka dijadikan sebagai pegangan atau bahkan doktrin pembangunan dan hal ini lazim disebut sebagai suatu ketahanan nasional. Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan setelah alinea III tentang pernyataan Proklamasi,"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa..” Pernyataan dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai landasan fundamental geostretegi Indonesia. Hal ini sejalan dengan kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam Negara Indonesia merupakan suatu dasar fundamental negara, atau dalam ilmu hukum disebut sebagai '*staats fundamental norm*', atau pokok kaidah negara yang fundamental, yang merupakan sumber hukum dasar negara.

Berdasarkan pengertian tersebut maka berkembangnya geostrategi Indonesia sangat terkait erat dengan hakikat tsrbentuknya bangsa Indonesia yang terbentuk dari berbagai macam etnis, suku, ras, golongan, agama bahkan terletak dalam teritorial yang terpisahkan oleh pulau-pulau dan lautan. Hal itu terwujud karena adanya proses sejarah, nasib serta tujuan untuk mencapai martabat kehidupan yang lebih baik. Dengan lain perkataan menurut Notonegoro terbentuknya bangsa Indonesia merupakan proses persatuan 'monopluralis'. Oleh karena itu prinsip-prinsip nasionalisme Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Kesatuan sejarah*, yaitu bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dalam suatu proses sejarah, sejak zaman pra-sejarah, Sriwijaya, Majapahit, Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan sampai proklamasi 17 Agustus 1945, dan kemudian membentuk bangsa dan Negara Indonesia.
2. *Kesatuan nasib*, yaitu segenap unsur bangsa berada dalam suatu proses sejarah yang sama dan mengalami nasib yang sama, yaitu dalam penderitaan penjajahan dan kebahagiaan bersarna.
3. *Kesatuan kebudayaan*, yaitu beraneka ragam kebudayaan tum-buh dan berkembang dan secara bersama-sama inembentuk puncak-puncak kebudayaan nasional Indonesia.
4. *Kesatuan wilayah*, yaitu segenap unsur bangsa Indonesia ber-diam di segenap wilayah teritorial yang dalam wujud berbagai pulau, dengan lautannya, namun merupakan satu kesatuan wilayah tumpah darah negara dan bangsa Indonesia.
5. *Kesatuan asas kerokhanian*, yaitu adanya kesatuan ide, tujuan, cita-cita dan nilai-nilai

kerokhanian yang secara keseluruhan tersimpul dalam dasar filosofis negara Indonesia Pancasila (Notonagoro, 1975:106).

Berbeda dengan prinsip-prinsip geostrategi yang dikembangkan oleh Rudolf Kjelle, Karl Haushoffer, Frederich Ratzel yang mengembangkan geostrategi demi kepentingan militer, bagi bangsa Indonesia geostrategi dikembangkan demi tujuan bangsa dan Negara Indonesia yang bersifat mulia, yaitu kesejahteraan dalam kehidupan bersama.

Oleh karena itu geostrategi Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas kemanusiaan dan keadilan sosial. Dapat pula dikatakan bahwa geostrategi Indonesia adalah memanfaatkan segenap kondisi geografi Indonesia untuk tujuan politik, dan hal itu secara rinci dikembangkan dalam pembangunan nasional (Lihat Suradinata, 2005: 33; Armawi, 2005: 1).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka geostrategi Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integritas bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah negara Indonesia, maka geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk Ketahanan Nasional.

Negara Indonesia sebagai suatu negara memiliki letak geografis yang sangat strategis di Asia Tenggara. Oleh karena itu di kawasan Asia Tenggara Indonesia memiliki posisi yang sangat penting, sehingga tidak menutup kemungkinan di era global dewasa ini menjadi perhatian banyak negara di dunia. Berdasarkan peranan dan posisi negara Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan akan merupakan ajang perebutan kepentingan kekuatan transnasional. Oleh karena itu sebagai suatu negara, Indonesia harus memperhatikan dan mengembangkan ketahanan nasional.

Ketahanan nasional sebagai istilah sebenarnya belum lama dike-nal. Istilah ketahanan nasional mulai dikenal dan dipergunakan pada pennulaan

tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional untuk pertama kali dikemukakan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Soekarno. Kemudian pada tahun 1962 mulai diupayakan secara khusus untuk mengembangkan gagasan ketahanan nasional di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung (Annawi, 2005:2).

Pengertian Ketahanan Nasional adalah suatu kondisi dinamis suatu bangsa, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan dalam mengejar tujuan nasional Indonesia (Suradinata, 2005: 47).

Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensinya dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasionalnya harus memiliki suatu ketahanan nasional. Dalam hubungan ini cara mengembangkan dan mewujudkan ketahanan nasional, setiap bangsa berbeda-beda, sesuai dengan falsafah, budaya dan pengalaman sejarah masing-masing. Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia ketahanan nasional dibangun di atas dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia yaitu Pancasila. Sebagai dasar falsafah bangsa dan negara, Pancasila tidak hanya merupakan hasil pemikiran seseorang saja, melainkan nilai-nilai Pancasila telah hidup dan berkembang dalam kehidupan objektif bangsa Indonesia sebelum membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara. Hal ini yang menurut Notonagoro disebut sebagai kausa materialis Pancasila. Kemudian dalam proses pembentukan negara, nilai-nilai Pancasila dirumuskan oleh para pendiri negara Indonesia (*founding fathers*), dan secara formal yuridis Pancasila ditetapkan sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia, dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu dalam pengertian ini Pancasila sebagai suatu dasar falsafah dan sekaligus sebagai landasan ideologis ketahanan nasional Indonesia.

Dalam hubungan dengan realisasi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, maka filsafat Pancasila merupakan esensi dari pokok kaidah negara yang fundamental. Konsekuensinya Pancasila merupakan suatu pangkal tolak derivasi dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk hukum dasar dalam seluruh sistem hukum positif lainnya (Kaelan, 2004). Sementara itu dalam hubungannya dengan ketahanan nasional, dalam konsepsi dan seluruh pelaksanaannya harus memiliki landasan yuridis. Yang jelas atas dasar pengertian ini maka landasan konstitusional atau landasan yuridis ketahanan nasional Indonesia adalah UUD 1945, yang bersumber pada dasar falsafah Pancasila.

1. Konsepsi Ketahanan Nasional

Secara konseptual, ketahanan nasional suatu bangsa dilatarbelakangi oleh:

- Kekuatan apa yang ada pada suatu bangsa dan negara sehingga ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya.
- Kekuatan apa yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dan negara sehingga ia selalu mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, meskipun mengalami berbagai gangguan, hambatan dan ancaman baik dari dalam maupun dari luar.
- Ketahanan atau kemampuan bangsa untuk tetap jaya, mengandung makna keteraturan (*regular*) dan stabilitas, yang di dalamnya terkandung potensi untuk terjadi penambahan (*the stability idea of changes*) (Usman, 2003: 5)

Berdasarkan konsep pengertiannya maka yang dimaksud dengan **Ketahanan** adalah suatu kekuatan yang membuat suatu bangsa dan negara dapat bertahan, kuat menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan. Konsekuensinya suatu ketahanan harus disertai dengan keuletan, yaitu suatu usaha secara terus-menerus secara giat dan berkemauan keras menggunakan segala kemampuan dan kecakapan untuk mencapai tujuan dan cita-

cita nasional. Identitas merupakan ciri khas suatu negara dilihat sebagai suatu totalitas, yaitu suatu negara yang dibatasi oleh wilayah, penduduk, sejarah, pemerintahan dan tujuan nasionalnya, serta peranan yang dimainkan di dunia internasional. Adapun pengertian lain yang berkaitan dengan integritas adalah kesatuan yang menyeluruh dalam kehidupan bangsa, baik sosial maupun alamiah, potensial ataupun tidak potensial. *Tantangan* adalah merupakan suatu usaha yang bersifat menggugah kemampuan, adapun *ancaman* adalah suatu usaha untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan atau keadaan secara konseptual dari sudut kriminal maupun politis. Adapun *hambatan* adalah suatu kendala yang bersifat atau bertujuan melemahkan yang bersifat konseptual yang berasal dari dalam sendiri. Apabila hal tersebut berasal dari luar maka dapat disebut sebagai kategori *gangguan*.

Berdasarkan pengertian sifat-sifat dasarnya maka ketahanan nasional adalah:

a. Integratif

Hal itu mengandung pengertian segenap aspek kehidupan kebangsaan dalam hubungannya dengan lingkungan sosialnya, a. lingkungan alam dan suasana ke dalam seing roengadakan penyesuaian yang selaras dan serasi. b. Mawas ke dalam Ketahanan nasional terutama diarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, untuk mewujudkan hakikat dan sifat nasionalnya. Pengaruh luarnya adalah hasil yang wajar dari hubungan internasional dengan bangsa lain. c. Menciptakan kewibawaan. Ketahanan nasional sebagai hasil pandangan yang bersifat integratif mewujudkan suatu kewibawaan nasional serta memiliki *deferrent effect*, yang harus diperhitungkan pihak lain. d. Berubah menurut waktu, Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkat atau bahkan dapat juga menurun, dan hal itu sangat tergantung kepada situasi dan kondisi.

Konsepsi ketahanan nasional dapat juga dipandang sebagai suatu pilihan atau alternatif dan konsepsi tentang kekuatan nasional (*national power*), yang biasanya dianut oleh

negara-negara besar di dunia. Konsepsi tentang kekuatan nasional bertumpu pada kekuatan, terutama bertumpu pada kekuatan fisik militer dengan politik kekuasaannya (*power politics*), sedangkan ketahanan nasional tidak semata-mata mengutamakan kekuatan fisik, melainkan memanfaatkan daya dan kekuatan lainnya pada suatu bangsa. Ketahanan nasional pada hakikatnya merupakan suatu konsepsi dalam pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan kemakmuran serta pertahanan dan keamanan didalam kehidupan nasional. Untuk dapat mencapai suatu tujuan nasional suatu bangsa harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan keuletan. Dengan demikian jelas bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dengan mempergunakan baik pendekatan kesejahteraan, maupun pendekatan keamanan. Kehidupan nasional tersebut dapat dibagi ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

a. Aspek alamiah yang meliputi:

- 1) Letak geografis negara
- 2) Keadaan dan kekayaan alam
- 3) Keadaan dan kemampuan penduduk

b. Aspek kemasyarakatan yang meliputi:

- 1) Ideologi
- 2) Politik
- 3) Ekonomi
- 4) Sosial budaya dan hankam
- 5) Pertahanan dan keamanan

Unsur-unsur tersebut yang meliputi alamiah karena jumlahnya tiga, maka disebut sebagai Tri Gatra; sedangkan aspek kemasyarakatan dinamakan Panca Gatra, karena jumlahnya lima. Keseluruhan unsur secara sistematis yang membagi kehidupan nasional dalam delapan aspek tersebut disebut Asta Gatra.

Konsepsi ketahanan nasional tidak memandang aspek-aspek alamiah dan kemasyarakatan secara terpisah-pisah melainkan meninjaunya secara korelatif, di mana aspek yang satu senantiasa berhubungan erat dengan lainnya, sedangkan keseluruhannya merupakan suatu konfigurasi yang menimbulkan daya tahan nasional.

2. Ketahanan Nasional sebagai Kondisi

Ditinjau dari segi sifatnya maka sebenarnya konsepsi ketahanan nasional tersebut bersifat objektif dan umum, oleh karena itu secara teroretis dapat diterapkan di negara manapun juga. Dalam hubungan dengan

penerapan konsepsi tersebut faktor situasi dan kondisi negara sangat menentukan. Oleh karena itu meskipun secara konsepsional sama, namun karena situasi dan kondisi negara berbeda-beda, maka wujud ketahanan nasionalpun akan berbeda-beda pula. Oleh karena itu berkaitan dengan kondisi ketahanan nasional Indonesia, adalah kondisi dinamis bangsa dan negara Indonesia. Sesuai dengan konsepsi ketahanan nasional, maka kondisi tersebut mengandung suatu kemampuan untuk menyusun kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekuatan ini diperlukan untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai bentuk ancaman yang ditujukan terhadap bangsa dan negara Indonesia.

Dalam hubungan dengan ketahanan nasional Indonesia dengan memperhatikan berbagai macam bahaya, gangguan yang mengarah serta situasi dan kondisi dalam negara Indonesia, maka ditentukan strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara Indonesia. Bagi bangsa dan negara Indonesia bahaya yang mengancam dapat berupa subversi dan infiltrasi terhadap semua bidang kehidupan masyarakat, serta adanya kelemahan-kelemahan yang inheren dengan masyarakat majemuk yang sedang membangun, maka strategi yang dipilih adalah strategi untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia, maka cara yang dipilih adalah dengan memantapkan ketahanan nasional. Strategi ini ditentukan berdasarkan atas: pengalaman sendiri, yang kemudian diolah dan disistematisir hingga menjadi doktrin. Demikian maka ketahanan suatu bangsa adalah merupakan suatu persoalan universal, sedang cara dan strategi nasional ditentukan berbeda-beda. Terdapat berbagai istilah misalnya *strategy interdependence*, *strategy of limited war*, sedangkan bagi bangsa Indonesia dikembangkan konsepsi strategi ketahanan nasional.

3. Pengaruh Aspek Ketahanan Nasional terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Konsepsi Tannas sebagaimana dijelaskan di depan yang merupakan suatu gambaran dari kondisi sistem kehidupan nasional dalam berbagai aspek pada suatu saat tertentu. Dengan sendirinya berbagai aspek tersebut memiliki sifat dinamis terutama dalam era global dewasa ini. Konsekuensinya tiap-tiap

aspek senantiasa berubah sesuai dengan kondisi waktu, ruang dan lingkungan sehingga interaksi dari kondisi tersebut sangat kompleks dan sulit dipantau.

Dalam era reformasi dewasa ini dan dalam rangka bangsa Indonesia menyongsong era global, maka tidak mengherankan jikalau berbagai aspek akan mempengaruhi ketahanan nasional baik dalam aspek ideologi, politik, sosial, budaya serta aspek pertahanan dan keamanan. Sebagaimana dipahami bahwa dalam era global dewasa ini setiap bangsa tidak mungkin dapat menentukan kebijaksanaannya hanya berdasarkan kemampuan dan otoritas bangsa itu sendiri melainkan senantiasa berkaitan dengan kekuatan bangsa lain dalam pergaulan internasional. Sebagaimana dikemukakan oleh Rosenau bahwa pergeseran arti tahap industrial ke tahap pasca industrial telah mengubah kondisi verbal manusia. Periode politik internasional di mana negara kebangsaan mendominasi skenario global, telah digantikan dengan periode pasca internasional, yaitu periode di mana negara kebangsaan harus membagi panggung pentasnya dengan berbagai organisasi inter-asional dan transnasional dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup (Hall, 1990: 71). Dunia mulai bergeser dari dunia yang berpusat pada negara (*state centric world*) kepada dunia yang berpusat majemuk (*multi centric world*) dan sebagaimana dilihat dalam panggung politik dunia negara adidaya sangat berperan dalam segala aspek kebijakan negara, terutama negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Kondisi krisis yang melanda bangsa Indonesia pada era reformasi dewasa ini sangat mempengaruhi berbagai kebijakan dalam negeri maupun luar negeri Indonesia. Pengaruh ideologi dunia menjadi semakin kuat melalui isu demokrasi dan penegakkan HAM dalam wujud kekuatan-kekuatan yang ada pada elemen masyarakat terutama Lembaga Swadaya Masyarakat yang banyak mendapat dukungan kekuatan internasional serta berbagai elemen infrastruktur politik. Hal ini yang merupakan kendala bagi kokohnya ketahanan nasional yang berbasis pada ideologi bangsa dan negara, karena banyak elemen-elemen masyarakat lebih setia terhadap kekuatan asing daripada kepada filosofi bangsanya sendiri. Barangkali kenyataan ini yang merupakan wujud

penjajahan pada era pasca modern dewasa ini. Di lain pihak kondisi krisis yang melanda bangsa Indonesia menimbulkan berbagai pengangguran serta penderitaan rakyat, terlebih lagi kurangnya kepekaan moralitas politik kalangan elit politik untuk mendahulukan perbaikan nasib bangsa dari pada mengembangkan sentimen politik, balas dendam serta kecurigaan dengan berebut predikat tokoh refonnasi total. Keadaan yang demikian ini menimbulkan gerakan diberbagai elemen masyarakat.

I. DAFTAR PUSTAKA

- Gelner, Ernes. 1995. **Membangun Masyarakat Sipil, Prasyarat Menuju Kebebasan**, Bandung: Mizan.
- Hikam, Muhammad AS., 1999. **Demokrasi dan Civil Society**, Jakarta: LP3ES.
- Kaelan dan Zubaidi Ahmad. 2007. **Pendidikan Kewarganegaraan**. Yogyakarta: Paradigma.
- Kusnardi, M., dan Hamiaily Ibrahim, 1995, **Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia**, Pusat Studi HTN Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, Jakarta.
- Lasky, Harold, J., 1947, **The State in Theory and Practice**, The Viking Press, New York.
- Leahy Louis, SJ., 1992, **Aliran-aliran Besar Atheisme**, Kanisius, Yogyakarta.
- Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), 1991, **Kewiraan Untuk Mahasiswa**, Dirjen D'kti Depdikbud dan PT Gramedia, Pustaka Utama, Jakarta.
- Lemhannas RI, 2000, **Pendidikan Kewarganegaraan**, Diktat SUSCADOSWAR, XLIV Lemhannas RI.
- Mahfud, Moh. MD., 1999, **Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi**, Gama Media, Yogyakarta.
- Mansoer, H, Hamdan, 2006, **Acuan Pembelajaran Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan**, Makalah pada Pelatihan Dosen Kewarganegaraan, Ditjen Dikti, Jakarta.